

BAB I

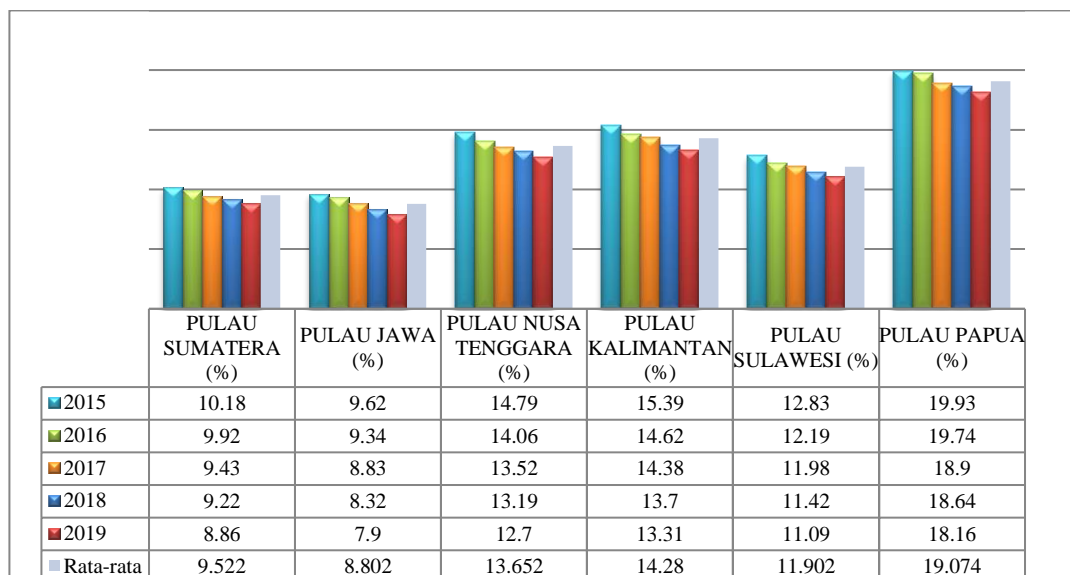
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar bagi negara-negara yang tergolong dalam negara sedang berkembang. Menurut Siregar & Wahyuniarti (2008) kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencapai standar atas setiap aspek kehidupan. Seseorang dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatannya atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang yang memiliki akses terhadap barang dan jasa yang tergolong tinggi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan keadaan yang rumit dan kompleks berkaitan dengan aspek sosial, budaya dan ekonomi serta bersifat multidimensional. Sehingga kebijakan yang dibuat untuk pengentasan kemiskinan pun harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Indonesia yang belum bisa dihindari sampai saat ini. Berbagai macam usaha dan kebijakan-kebijakan pemerintah baik dari pusat hingga turun ke masing-masing daerah yang telah dikeluarkan untuk mengatasi kemiskinan, akan tetapi yang terjadi dilapangan adalah makin meningkatnya angka kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikarenakan kondisi alamiah dan ekonomi, disebabkan kondisi struktural dan sosial, serta disebabkan kondisi kultural (budaya). Selain itu ketimpangan yang terjadi antar daerah masih sangat tinggi. Di satu sisi Indonesia merupakan negara maritim atau negara kepulauan yang didalamnya terdapat 6 pulau besar

yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Dari 6 pulau besar ini didalamnya terdapat 34 provinsi yang tersebar di masing-masing pulau tersebut. Hal ini dapat memicu tingginya ketimpangan antar daerah, karena tiap daerah memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Untuk melihat fenomena kemiskinan di Indonesia dengan jelas, berikut disajikan data kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).



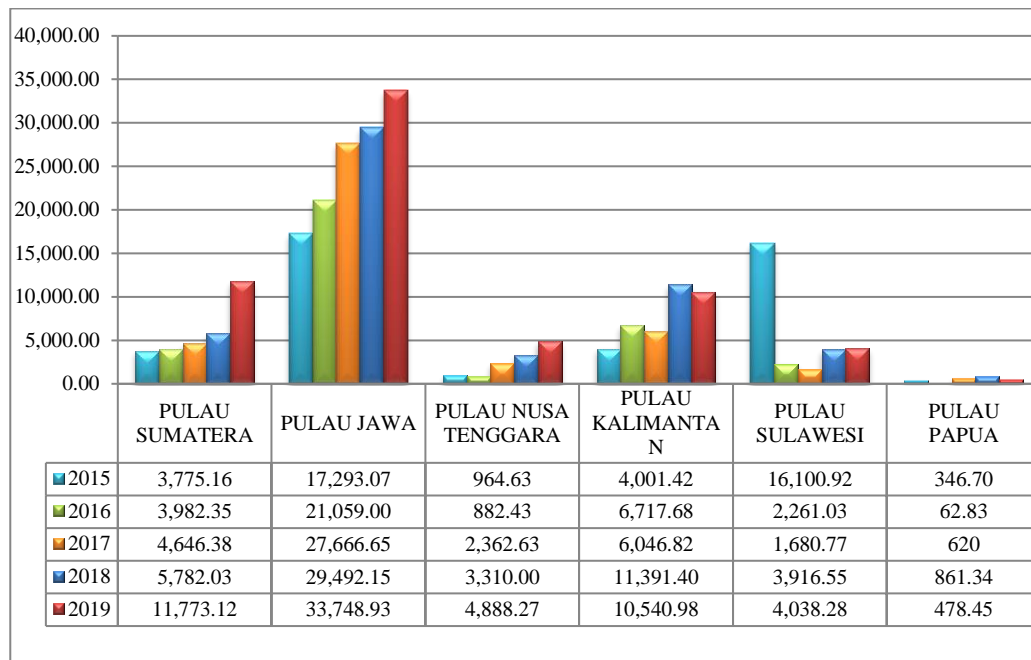
Sumber Badan Pusat Statistik 2015-2019

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa Pulau Papua merupakan kawasan yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan pulau lainnya dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu sebesar 19.07%. Pulau Kalimantan memiliki rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi kedua setelah Pulau Papua yaitu sebesar 14.28%. Kemudian diikuti oleh Pulau

Nusatenggara yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 13.65%, tertinggi ketiga setelah Pulau Papua dan Pulau Kalimantan. Setelah itu ada Pulau Sulawesi yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 11.90% dan diikuti oleh Pulau Sumatera yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 9.52%. Pulau Jawa menjadi kawasan yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan paling rendah dibandingkan kawasan lainnya yaitu hanya sebesar 8.80%. Meskipun demikian secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir, kemiskinan di Indonesia tergolong masih sangat tinggi dan memprihatinkan.

Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan berbagai strategi dan melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari unsur masyarakat miskin itu sendiri. Dari beragam hal yang diharapkan mampu untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah melalui investasi. Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan dimasa yang akan datang. Apabila semua tenaga kerja berkualitas terlibat aktif dalam perekonomian, akan meningkatkan output barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.



Sumber Badan Pusat Statistik 2015-2019

Gambar 1.2 Perkembangan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan investasi penanaman modal dalam negeri tertinggi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019 berada pada Pulau Jawa dimana pada tahun 2015 sebesar 17,293.07 (Miliar Rp) kemudian mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga di tahun 2019 berada di angka 33,748.93 (Miliar Rp). Sedangkan dilihat dari investasi terendah di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019 berada pada Pulau Papua yang mana tiap tahunnya juga mengalami fluktuasi dan hanya mencapai angka ratus juta. Pada tahun 2015 posisi investasi (PMDN) di Pulau Papua berada di angka 346.70 (Juta Rp), kemudian pada tahun 2016 turun drastis menjadi 62.83 (Juta Rp). Tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 620 (Juta Rp) di tahun 2017 dan 861.34 (Juta Rp) di tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 478.45 (Juta Rp).

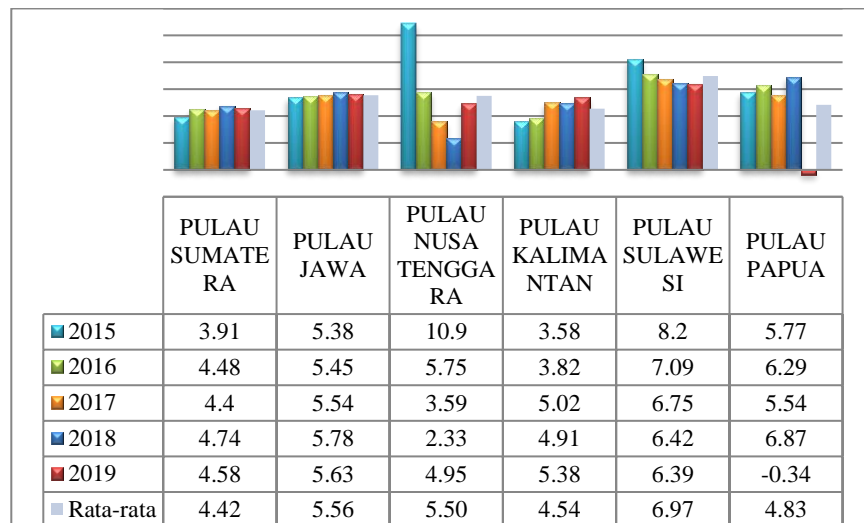
Dengan adanya investasi, suatu daerah dapat mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang bernilai sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Terserapnya tenaga kerja pada lapangan pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, masyarakat sendiri akan mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perkembangan investasi dapat mengurangi jumlah masyarakat yang berada dibawah kemiskinan.

Selain itu Investasi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula investasi suatu daerah, semakin tingginya investasi, pengangguran akan menurun apabila tingkat pengangguran rendah maka akan berbanding lurus terhadap tingkat kemiskinan (Fosu,2010).Peran investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat vital mengingat bahwa investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi pengeluaran. Semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu daerah diasumsikan pula dapat menekan angka kemiskinan walaupun pengaruhnya di kehidupan nyata tidak berbanding lurus dengan apa yang diasumsikan tadi.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi adalah poros perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan investasi, membuka lapangan kerja, menyerap angkatan kerja, yang pada gilirannya akan

menurunkan tingkat kemiskinan (Seran,2017).Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau memungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro,2011).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada taraf pertumbuhan yang rendah.Selain mengalami fluktuasi tiap tahunnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh sangat lambat.Hal ini disebabkan oleh banyaknya persoalan makroekonomi yang belum teratasi dengan baik.Sektor-sektor perekonomian tidak berjalan dengan baik bahkan ada yang tidak sesuai sasaran. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) ekonomi Indonesia di tahun 2019 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih rendah dari capaian di tahun sebelumnya sebesar 5,17 persen. Secara spasial di tahun 2019 ekonomi Indonesia didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Pulau Jawa memberikan Kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,05% di tahun 2019. Untuk memperoleh gambaran pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019, berikut disajikan data pertumbuhan ekonomi antar Pulau yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).



Sumber Badan pusat Statistik 2015-2019

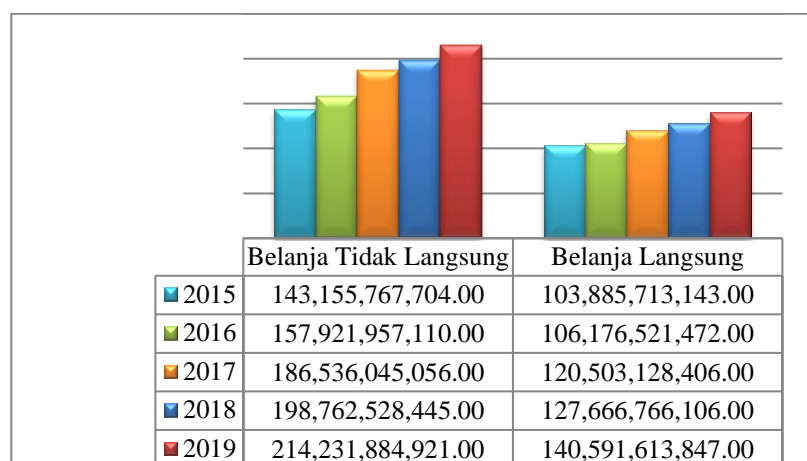
Gambar 1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015-2019 didominasi oleh Pulau Sulawesi yaitu sebesar 6.97% diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 5.56% dan Pulau Nusa Tenggara sebesar 5.56%. Pulau Papua memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4.83%, sedangkan Pulau Kalimantan sebesar 4.54%. Pulau Sumatera menjadi Pulau yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling kecil dibandingkan pulau lainnya yaitu sebesar 4.42%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami ekspansi, pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia fluktuatif tiap tahunnya. Pada masa pemerintahan sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung naik, tetapi pada masa pemerintahan saat ini mulai menurun walaupun kedepannya ada potensi untuk semakin lebih baik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kesejahteraan, artinya semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi (Saputra, 2011).

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka sebuah negara dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin meningkatnya produksi suatu negara tersebut. Sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat. Sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi ini dapat mengurangi kemiskinan di suatu negara (Dwi,2010:32).

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (Osinubi,2005).



Sumber Badan Pusat Statistik 2015-2019

Gambar 1.4 Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2015-2019

Berdasarkan Gambar 1.4 diatas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk belanja, sebagian besar dianggarkan untuk belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung. Dalam kurun waktu 2015-2019, belanja tidak langsung oleh pemerintah pusat mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2015 berada di angka Rp. 143,155,767,704. Kemudian setelah mengalami peningkatan di tiap tahunnya, pada akhirnya di tahun 2019 berada di angka Rp. 214,231,884,921.00. Hal ini terbilang cukup besar dibandingkan dengan anggaran belanja langsung oleh pemerintah pusat walaupun belanja langsung juga ikut meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2015 belanja langsung oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 103,885,713,143. Kemudian setelah mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2019 berada di angka Rp. 140,591,613,847.00. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan antara belanja tidak langsung dan belanja langsung oleh pemerintah pusat ini terlampau jauh perbedaannya.

Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ketahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat hampir didalam semua sistem perekonomian. Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini, semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam proposirnya terhadap pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dalam arti rill dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah, yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Tetapi hendaknya kita sadari bahwa proporsi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional bruto (GNP) adalah suatu

ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan atau peranan pemerintah dalam suatu perekonomian(Suparmoko,2003:22).

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen untuk mengatasi kemiskinan yang ada dinegara kita. Pemerintah sudah mengupayakan dan melakukan berbagai macam kebijakan atau program untuk pengentasan kemiskinan dengan berbagai pengeluaran. Pemerintah membuat beberapa program yaitu BOS (bantuan operasional sekolah) bagian pendidikan, Raskin (beras miskin), BLT (bantuan langsung tunai), PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri), BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), kartu sakti jokowi (kartu sehat, pintar, dan sejahtera), dana desa, dan masih banyak lagi program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dinegara ini namun sampai dengan saat ini masalah kemiskinan masih terus berlanjut di Indonesia.

Kondisi riil yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa makin hari penduduk miskin malah semakin bertambah.Kondisi ini tentunya bukanlah hal yang baru mengingat bahwa perekonomian Indonesia pun tumbuh sangat lambat.Kondisi kemiskinan juga di pengaruhi oleh tingkat ketimpangan yang sangat tinggi antara penduduk pedesaan dan perkotaan.Selain itu tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi pula menjadikan angka kemiskinan sangat tinggi.Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi alasan tingginya angka pengangguran.Penduduk di wilayah pedesaan sebagian besar hanya bekerja sebagai petani dan nelayan maupun buruh bangunan.Hal ini dapat menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat pedesaan lebih rendah dibandingkan masyarakat

perkotaan. Bantuan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan pun terbilang tidak efektif karena sebagian besar penduduk miskin yang menerima bantuan tidak memanfaatkan bantuan tersebut sesuai sasaran. Susahnya penduduk untuk memperoleh pendapatan yang layak menjadikan mereka hidup diambang kemiskinan. Konsekuensinya adalah banyak masyarakat yang melakukan peminjaman uang baik itu di perbankan maupun perusahaan multi finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu tidak sedikit masyarakat yang beralih profesi bahkan ada yang memilih untuk mengemis di jalanan. Ini merupakan fenomena penduduk kelas bawah yang tergolong dalam masyarakat miskin. Maka dari itu berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, minimal menguji teori-teori ekonomi yang berkaitan dengan pengaruh investasi, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan ekonomi makro. Pemerintah mendapatkan informasi yang memadai dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah